

KOLOM SI KLERK

TKI

Sejak dipulangkan dari Malaysia, sejumlah 480.000 orang Tenaga Kerja Indonesia (TKI) merana di Nunukan. Nunukan adalah merupakan kantong penampungan bagi para TKI ilegal yang diusir pemerintah Malaysia. TKI ini juga menambah panjang daftar pengangguran di Indonesia. Jika jumlah pengangguran terus bertambah, dipastikan akan menambah jumlah penduduk yang miskin. Logikanya, orang tidak bekerja, tidak memiliki penghasilan dan akibatnya tidak dapat memenuhi kebutuhan konsumsinya. Dari sejumlah TKI yang diusir tersebut, mereka bekerja pada sektor tenaga kasar dengan tingkat pendidikan yang rendah pula. Menurut Dony Abdul Cholid, pengangguran merupakan momok yang menakutkan karena memberikan efek berantai (efek domino) yang luas terhadap kemiskinan dan proses pembangunan nasional.

Terelepas dari apa yang akan terjadi dengan mereka, yang patut diperhatikan adalah penanganan yang dilakukan oleh pemerintah. Penanganan para TKI ini banyak yang mengkritik bahwa pemerintah lamban mengurus mereka. Hal ini diakui Wapres Media Indonesia) bahwa para TKI ilegal ini memang lambat diproses oleh pemerintah. Wapres mengakui kesalahan pemerintah yang kurang cepat memproses dokumen para TKI ilegal sesuai dengan UU keimigrasian yang berlaku di Malaysia. Seperti biasa jika sesuatu terjadi beberapa Departemen terlibat saling menyalahkan atau mengklaim bahwa Departemen-nyalah yang paling berjasa atas penyelesaian masalah yang terjadi. Tetapi dalam kasus ini, Wapres membantah adanya konflik antara Menakertrans Jacob Nuwa Wea dan Menlu Hasan Wirajuda akibat batalnya penandatanganan MoU masalah TKI antara Pemerintah Malaysia dan Indonesia.

Keprihatinan kita terhadap nasib para TKI di Nunukan, semakin menjadi apalagi beberapa dar mereka ada yang "menjual" anak kandungnya seharga 1 juta rupiah kepada salah satu keluarga di Nunukan untuk dapat kembali ke Sabah Malaysia. Di samping itu para TKI tersebut sudah banyak yang terkena penyakit, dan kekurangan makanan dan minuman. Sejalan dengan pengakuan Wapres di atas, tanggung jawab dan peran pemerintah dalam penanganan kasus TKI juga masih kurang. Menurut Faisal Basri masalah koordinasi antar departemen dan kurangnya atase ketenagakerjaan di luar negeri menyebabkan lemahnya penanganan masalah yang dihadapi TKI. Belum lagi masalah penyalur tenaga kerja dan tenaga kerja-nya sendiri yang sering tidak mematuhi peraturan yang ada. Disamping itu mereka juga rawan dari perlindungan hukum. Terlihat di sini bahwa pemerintah belum serius menangani kasus TKI tersebut.

Perlu disimak juga, apa yang disampaikan oleh Faisal Basri, bahwa sudah waktunya pemerintah mengirim TKI yang *skilled labour* dan terdidik ketimbang yang asal-asalan. Pemberdayaan harus dilakukan terutama yang menyangkut pendidikan, pelatihan, penempatan yang sesuai dengan minat dan bakat kemampuan mereka. Dengan demikian kualitas TKI ini akan dapat meningkat. Mereka adalah penghasil devisa yang cukup besar bagi negara kita. Apakah terus akan disia-siakan? (*Dayat Hidayat*).